



## PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI MOTIVASI

Sulis Winurini\*)

### Abstrak

*Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.*

### Pendahuluan

Baru-baru ini publik kembali dikejutkan dengan berita penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus korupsi. PA ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017. Penetapan ini dilakukan setelah PA diperiksa intensif usai ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Rabu, 25 Januari 2017. Kasus korupsi di lembaga MK bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Akil Mochtar, mantan Ketua MK terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Kasus korupsi di tubuh MK adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus tersebut menjerat 967 terdakwa korupsi. Secara kuantitatif, sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi

\*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: sulis.winurini@dpr.go.id



maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Ada pun jumlah pelaku korupsi yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109 orang. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada tahun 2001-2009. Terpidana korupsi sebagian besar adalah PNS, yaitu 1.115 orang, kemudian diikuti terpidana swasta/lain-lain, yaitu 670 orang, dan terpidana politisi sebanyak 559 orang. Modus korupsi terbanyak yang ditangani KPK pada tahun 2015 adalah penyuapan dan pengadaan barang/jasa.

Mengacu pada data tersebut di atas, kasus korupsi menjadi sesuatu yang ironis karena sebagian pelaku memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, sudah ada upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat/pegawai negara melalui perbaikan sistem remunerasi, sejalan dengan sistem merit dalam Reformasi Birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaannya kemudian adalah mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan? Tulisan ini akan menguraikan perilaku korupsi dari perspektif psikologi, yaitu dari teori motivasi.

### Perilaku Korupsi dan Teori Motivasi McClelland

Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu (Kast dan Rosenzweig, 1970: 296). Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhan dasarnya (Yorks, 1976: 21).

Menurut McClelland (1961, 1975, 1985), individu termotivasi tiga dorongan dasar, yaitu: kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan berprestasi adalah keinginan untuk melebihi atau mencapai standar, kebutuhan afiliasi adalah keinginan untuk berteman, bekerja sama, dan membina hubungan dekat, sedangkan kebutuhan kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang lain, untuk memiliki prestise, untuk merasa lebih kuat dibandingkan orang lain.

Ada pun korupsi adalah bentuk dari perilaku yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum, menyimpang norma atau moral, dan terjadi dalam lembaga pemerintah maupun korporasi swasta (Abidin, 2015: 12).

### Penyebab Munculnya Perilaku Korupsi Menurut Teori Motivasi

Mengacu pada teori motivasi yang dikemukakan McClelland, Wu dan Huang (2011) menemukan bahwa motif afiliasi dan kekuasaan memiliki hubungan langsung dengan perilaku suap sebagai bagian dari perilaku korupsi. Hubungan antara motif afiliasi dengan perilaku suap diperantarai keadilan distributif, sementara hubungan antara motif kekuasaan dengan perilaku suap diperantarai peluang.

Berkaitan dengan motif afiliasi, Brand dan Slater (2003), Chen *et al* (2008) memiliki temuan yang sejalan. Berdasarkan studinya, perilaku suap dapat menjaga hubungan pertemanan serta mengurangi kebencian (Steidimeier, 1999), sekaligus menciptakan kesepakatan jangka panjang (Millington *et al.*, 2005), sehingga keberhasilan perusahaan dapat dipastikan. Temuan Wu dan Huang (2011) menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi pegawai pemerintah ketika mereka memberikan suap. Temuan ini mendukung gagasan Sanyal (2005) yang menyatakan bahwa manfaat komersial dapat diperoleh ketika perusahaan mempengaruhi pegawai pemerintah lewat suap. Selain itu, pembayaran suap dapat menurunkan tekanan pegawai pemerintah terhadap perusahaan sehubungan dengan penerapan peraturan yang membebani (Powpaka, 2002; Rose-Ackerman, 2002).

Temuan Wu dan Huang (2011) yang lain menunjukkan bahwa peluang untuk suap, terutama ketika praktik suap telah menjalar secara luas dan peraturan diterapkan secara ambigu, akan meningkatkan intensi perusahaan untuk melakukan suap. Seperti yang digambarkan oleh Sanyal (2005) dan Carmichael (1995: 61), suap dipandang sebagai bagian dari transaksi bisnis yang normal ketika hampir semua orang melakukannya. Ketika penegakan hukum lemah, maka suap akan

terjadi secara signifikan (Cuervo-Cazzura, 2008; Gray dan Kauffmann, 1998). Suap akan terfasilitasi dan terjadi secara terus-menerus ketika kedua belah pihak (penyuap dan penerima suap) memiliki persepsi yang sama sehubungan dengan seberapa adil pertukaran tersebut.

Hasil studi tersebut di atas sejalan dengan perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Siswadi (2015:103) menggambarkan, korupsi di Indonesia dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak pihak, bisa dari institusi yang sama, lintas institusi, pengusaha, termasuk keluarga pelaku itu sendiri. Sebagian besar kasus melibatkan pelaku dengan beragam profesi, seperti penyelenggara negara, politisi, penegak hukum, dan pengusaha. Ada peran perantara dalam prosesnya, yaitu sebagai penghubung antara penerima dan pemberi suap. Dalam kasus-kasus tertentu, perantara bertugas sebagai makelar, yakni mencari pihak-pihak yang dijanjikan akan diuntungkan dalam suatu transaksi. Pada praktiknya, terdapat sejumlah pelaku yang melakukan korupsi tidak hanya sekali saja, tetapi berkali-kali. Hal ini terjadi diduga karena sebelumnya pelaku tidak merasakan efek jera tetapi justru lebih banyak merasakan kepuasan karena korupsi. Faktor konformitas juga bisa menjadi penyebab, yaitu ketika masing-masing orang merasa bahwa korupsi merupakan hal yang biasa dilakukan. Situasi seperti ini menggambarkan besarnya peluang terjadinya korupsi di Indonesia.

Temuan lain dari Abidin dan Siswadi (2015: 64) menunjukkan bahwa motivasi tertinggi para pelaku korupsi yang menjadi partisipannya secara berturut-turut adalah motif kekuasaan, motif afiliasi, dan motif berprestasi. Motif kekuasaan paling tinggi dibandingkan dengan motif lainnya tergambar dari jabatan mereka yang relatif tinggi di pemerintahan maupun di dunia bisnis. Individu dengan motif kekuasaan tinggi memiliki kebutuhan akan status, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain. Sayangnya, motif kekuasaan yang ditunjukkan adalah motif yang sifatnya personal, yaitu motif berkuasa yang didasarkan pada kebutuhan pribadi dan egoistis. Motif inilah yang kemudian menekan individu mencari jalan pintas untuk berkuasa, salah satunya melalui korupsi.

Tingginya skor motif afiliasi menjelaskan mengapa korupsi besar (*grand corruption*) bisa terjadi secara kolektif. Tingginya skor motif afiliasi ditemukan sejalan dengan tingginya skor pada dimensi kompromi. Abidin dan Siswadi (2015:65) menjelaskan, kebutuhan para partisipan untuk menjalin relasi dengan orang lain cukup tinggi karena korupsi besar memerlukan kemampuan berafiliasi yang tinggi dengan orang lain, membuka jaringan dengan orang lain dari beragam profesi. Kemampuan berafiliasi dengan orang lain sedikit banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk melakukan kompromi dengan tuntutan atau kepentingan orang lain.

## Penutup

Ditinjau dari sisi motivasi, tampak bahwa motivasi tertinggi para pelaku korupsi secara berturut-turut adalah motif kekuasaan, motif afiliasi, dan motif berprestasi. Mengacu pada kesimpulan ini, maka untuk mengantisipasi berkembangnya perilaku korupsi, penerapan pendidikan karakter di sekolah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Untuk itu diperlukan upaya menumbuhkan motif berprestasi melalui penanaman nilai-nilai kejujuran. Dengan kejujuran, seseorang akan berusaha mencapai kesuksesan tanpa memilih cara curang atau jalan pintas. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa memiliki motif kekuasaan yang tinggi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Hanya saja, penekanan motifnya tidak ekstrem pada dorongan pribadi yang bersifat egoistis, melainkan perlu diseimbangkan dengan dorongan yang bersifat sosial. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki kekuasaan, ia akan tetap memperhatikan kepentingan sosial, tidak hanya kepentingan pribadinya saja. Oleh karena itu pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi, misalnya melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, bisa menjadi alternatif yang baik dalam pendidikan karakter sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

## Referensi

- Alvaro Cuervo-Cazurra. (2008). "The Effectiveness of Laws Against Bribery Abroad." *Journal of International Business Studies*, Vol. 39, Issue 4, 634-651.
- Andrew Millington, Markus Eberhardt & Barry Wilkinson. (2005). "Gift-Giving, Guanxi and Illicit Payments in Buyer-Supplier Relations in China: Analyzing The Experience of UK Companies." *Journal Business Ethics*, Vol. 57, Issue 3, 255-268.
- Cheryl W Gray and Daniel Kaufmann. (1998). "Corruption and Development." *Finance and Development*, Vol. 35, No.1, 7-11.
- David C. McClelland. (1961). *The Achieving Society*. Princeton, NJ: Van Nostrand Company Inc.
- David C. McClelland. (1975). *Power: The Inner Experience*. New York: Irvington.
- David C. McClelland. (1985). *Human Motivation*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Fremont Ellsworth Kast & James Erwin Rosenzweig. (1970). *Organization and Management: A Systems and Contingency Approach*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015), [http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16\\_RP\\_VR\\_THP.pdf](http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf), diakses 1 Februari 2017.
- Lyle Yorks. (1976). *A Radical Approach to Job Enrichment*. New York: Amacom.
- P. Steidlmeier. (1999). "Gift Giving, Bribery and Corruption: Ethical Management of Business Relationships in China." *Journal Business Ethics*, Vol. 20, No.2, 121-132.
- Rajib Sanyal. (2005). "Determinants of Bribery in International Business: The Cultural and Economic Factors." *Journal Business Ethics*, Vol. 59, Issue 1, 139-145.
- Samart Powpaka. (2002). "Factors Affecting Managers' Decision to Bribe: An Empirical Investigation." *Journal Business Ethics*, Vol. 40, Issue 3, 227-246.
- Shenna Carmichael. (1995). *Business Ethics: The New Bottom Line*. London: Demos.
- Susan Rose-Ackerman. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vivienne Brand & Amy Slater. (2003). "Using A Qualitative Approach to Gain Insights Into The Business Ethics Experiences of Australian Managers in China." *Journal Business Ethics*, Vol. 45, Issue 3, 167-182.
- Wann Yih Wu and Chu Hsin Huang (Julie). (2011). "The Independent and Interactive Roles of Motivation, Opportunity, and Distributive Justice on Bribery Activities." *African Journal of Business Management*, Vol. 5, Issue 4, 1454-1465.
- Yanjing Chen, Mahmut Yasar, dan Roderick M. Rejesus. (2008). "Factors Influencing The Incidence of Bribery Payouts by Firms: A Cross-Country Analysis." *Journal Business Ethics*, Vol. 77, Issue 2, 231-244.
- Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi. (2015). *Psikologi Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.